

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum dan berhak mengurus dan mengatur kepentingan masyarakat berdasarkan setempat berdasarkan adat istiadat dan nenek moyang setempat yang diakui oleh sistem pemerintahan setempat. Menurut undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa merupakan suatu peran penting bagi pemerintah Indonesia untuk memajukan pembangunan nasional. Pengembangan dilakukan melalui otorisasi kepada masing-masing desa guna menjalankan dan mengelola pemerintahan itu sendiri. Wewenang tersebut dipersembahkan oleh pemerintah pusat daerah sering disebut dengan istilah desentralisasi. Pengelolaan keuangan yang dipegang oleh pemerintah desa sendiri mampu memudahkan pemerintah pusat dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Hal ini dilakukan untuk menjawab pertanyaan mengenai kemiskinan dan kerentanan yang disebabkan oleh perbedaan dalam pembangunan pedesaan dan perkotaan, desentralisasi juga memberikan gambaran langsung melalui pemerintah desa dengan memberikan saran kepada pemerintah pusat tentang potensi yang dapat dikembangkan. Dengan hal ini desa diminta agar bisa mandiri dalam melakukan semua urusan pemerintahannya dalam melakukan pengelolaan keuangan dana desanya sendiri. Sumber keuangan desa bersumber dari

pendapatan asli desa yakni merupakan bentuk kemandirian suatu desa dalam melakukan pengelolaan keuangan. Sehingga desa tidak tergantung pada transfer dana yang berasal dari pemerintah daerah maupun pemerintah pusat oleh karena itu dapat memajukan potensi dalam meningkatkan kesejahteraan dan kualitas dalam masyarakat desa. Pada saat ini di sistem pemerintahan, desa sangat begitu memiliki peranan yang sangat strategis untuk membantu pemerintah daerah dalam melakukan proses penyelenggaraan pemerintahan, yang termasuk dalam melakukan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat sebagai langkah tujuan yang nyata pemerintah daerah dalam mendukung otonomi daerah di kawasan wilayahnya. Pemerintah desa khususnya kepala desa perlu mengetahui bagaimana mengatur dan menjalankan pengelolaan dengan baik agar pengelolaan pendapatan berjalan dengan baik ketika dalam melaksanakan pembangunan dan penataan desa. Baik buruknya pengelolaan ini tergantung dari kepemimpinan pemerintah desa itu sendiri. Menyadari adanya hambatan dalam melakukan pembangunan daerah, maka diperlukan paradigma pembangunan alternatif baru dikarenakan agar kebutuhan masyarakat dapat terjamin di setiap pelosok desa. Dengan demikian, desa membutuhkan daerah otonom untuk mengelola sumber pendanaan agar dapat berkembang dengan baik.

Di tingkat nasional, pemerintah pusat mengalokasikan dana untuk desa sangatlah besar dan untuk diserahkan kepada desa. Pada 2018, pemerintah pusat mengalokasikan Rp 60 Triliun, dan realisasi dana yang

dilaksanakan di desa mencapai Rp 59,86 triliun atau 98,77%. Pada tahun 2019, dana desa naik menjadi Rp 70 triliun, dan agustus 2019, realisasi dana desa mencapai Rp 42,2 triliun atau 60,29% dan pada tahun 2020 meningkat lagi menjadi Rp 72 triliun. Dana desa disetorkan ke 434 pemerintahan kabupaten/kota di 33 provinsi, mencapai 74.000 desa. Hal ini tidak berlaku untuk dana desa, hibah, dana bagi hasil, atau dana lain yang mengalir ke desa dalam bentuk pembangunan desa (hibah) lainnya. Dilihat dari rata-rata dana desa yang diterima setiap desa selama tiga tahun terakhir, ada kecenderungan meningkat. Pada tahun 2018, setiap rata-rata menerima dana sebesar Rp 8,4 juta, yaitu Rp933,9 juta pada tahun 2019 dan Rp 960,6 pada tahun 2020 (Sukarno W.Sumarto). Anggaran ini diharapkan dapat membiayai administrasi, melaksanakan pembangunan, pengembangan masyarakat, serta pemberdayaan kepada masyarakat.

Adanya alokasi dana desa diharapkan dapat meningkatkan pemberdayaan masyarakat, pembangunan, pelayanan masyarakat, dan pembinaan bagi masyarakat. Dalam pengolahan dana desa, dituntut adanya suatu aspek tata pemerintahan desa yang baik (Good Governance) terkait dalam ketentuan yang telah ditetapkan tersebut, dijelaskan supaya pengelolaan keuangan desa, memerlukan sistem akuntabilitas dan transparansi, sehingga masyarakat dapat mengetahui secara jelas mengenai perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, pentatausahaan, dan pelaporannya. Dalam proses tersebut, menuntut adanya aspek tata kelola pemerintahan yang baik dan efektif salah satunya yaitu akuntabilitas.

Akuntabilitas yaitu suatu wujud yang wajib bagi setiap individu, instansi, atau kelompok dalam memenuhi tanggung jawab yang telah diberikan kepadanya. Berdasarkan pada Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, Akuntabilitas dapat diartikan sebagai tanggung jawab untuk mengelola sumber daya dan melaksanakan kebijakan yang telah diberikan kepada perusahaan pelapor untuk mencapai target yang sudah ditetapkan secara berkala. Menurut Scott (2006), pengelolaan sumber daya pemerintah membutuhkan informasi kepada publik tentang kegiatannya. Dalam meningkatkan akuntabilitas kepercayaan kepada masyarakat pada tindakan yang diambil pemerintah dan mendorong masyarakat untuk mendukung tindakan yang dilakukan (Jorge et al. 2011).

Kecamatan Pucakwangi merupakan kecamatan satu diantara kecamatan lain di daerah Kabupaten Pati, Provinsi Jawa Tengah dengan letak yang berada di sisi paling selatan wilayah kabupaten Pati, yang berbatasan langsung dengan kecamatan Todanan Kabupaten Blora yang dibatasi dengan pegunungan kapur. Luas kecamatan pucakwangi sendiri yaitu 122,83 ha yang terdiri dari 20 desa dan terdapat jumlah rukun warga (RW) 67 sedangkan jumlah rukun tetangga (RT) ada 326. Sedangkan kecamatan Winong adalah kecamatan yang berbatasan langsung dengan kecamatan Pucakwangi di sebelah timur. Luas kecamatan winong 99,94 ha yang terdiri dari 30 desa dengan terdapat rukun warga (RW) 80 dan terdapat rukun tetangga (RT) 475.

Terdapat didalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 58 tentang pentingnya akuntabilitas sebagai berikut:

Q.S An-Nisa ayat 58

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya :

“Sesungguhnya, Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sesungguhnya, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat.”

Ayat ini menjelaskan bahwa akuntabilitas adalah implementasi pemerintah dalam melaksanakan Amanah, yang mana pemerintah sebagai agen yang memberi pertanggungjawaban pengelolaan dana desa yang diberikan kepada yang berhak menerimanya

Dari kutipan penjelasan ayat diatas bahwa akuntabilitas adalah perwujudan dari implementasi pemerintah menjalankan amanah, dimana pemerintah bertindak sebagai agen dengan memberikan pertanggungjawaban pengelolaan dana desa untuk di berikan yang berhak menerima seperti masyarakat sebagai principal yang mendapatkan informasi. Pengelolaan dana desa harus dilakukan dengan cepat, tepat, dan

akurat sehingga secara tidak langsung pegawai atau aparatur bisa menjalankan kewajibannya dalam melakukan penanganan dana desa yang baik untuk masyarakat.

B. GAP Penelitian

Tabel 1.1
GAP Penelitian

No	Variabel independen	Variabel dependen	Penulis dan jurnal	Hasil
1.	Partisipasi masyarakat	Akuntabilitas pengelolaan dana desa	Pengaruh kompetensi aparatur, komitmen organisasi, pemanfaatan teknologi informasi, partisipasi masyarakat dan spi terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di kabupaten indragiri hulu Sarah, S., Taufik, T., & Safitri, D. (2020)	Partisipasi masyarakat berpengaruh secara signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kabupaten Indragiri Hulu.

2			<p>Pengaruh partisipasi masyarakat, kompetensi sumber daya manusia, dan pengawasan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa (studi kasus pada kabupaten aceh barat daya</p> <p>Umaira, S., & Adnan, A. (2019).</p>	<p>Partisipasi Masyarakat berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas dana desa.</p>
3			<p>Pengaruh kompetensi pemerintah desa, partisipasi masyarakat dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa</p> <p>Indraswari, N. E., & Rahayu, Y. (2021)</p>	<p>Partisipasi masyarakat berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.</p>

4			<p>Pengaruh kompetensi aparat pengelolaan dana desa, komitmen organisasi pemerintah desa, dan partisipasi masyarakat terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di gorontalo</p> <p>Mada, S., Kalangi, L., & Gamaliel, H. (2017)</p>	<p>Partisipasi masyarakat berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.</p>
5			<p>Pengaruh kompetensi aparatur desa, sistem pengendalian internal, pemanfaatan teknologi informasi dan partisipasi masyarakat terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa</p>	<p>Partisipasi masyarakat berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.</p>

			Pahlawan, E. W., Wijayanti, A., & Suhendro, S. (2020)	
6			Studi perilaku berdasarkan pengaruh partisipasi masyarakat, kompetensi aparatur pengelola dana desa dan komitmen organisasi terhadap akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa Widjantie, T. D. (2021)	Partisipasi masyarakat mempengaruhi pengelolaan keuangan publik daerah di wilayah Tarik.
7			Pengaruh kompetensi aparat pengelola dana	Partisipasi masyarakat memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap

			<p>desa, komitmen organisasi pemerintah</p> <p>Desa, dan partisipasi masyarakat terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa</p> <p>(Studi Empiris Pada Kantor Desa Se-Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan)</p> <p>Sari, N. M. R., & Padnyawati, K. D. (2021)</p>	<p>akuntabilitas/pengelolaan dana desa.</p>
8			<p>Pengaruh kompetensi aparatur, komitmen organisasi, dan partisipasi masyarakat terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di kecamatan batujajar</p>	<p>Partisipasi masyarakat tidak mempengaruhi secara signifikan akuntabilitas pengelolaan dana desa.</p>

			Giriani, M., Dahtiah, N., & Burhany, D. I (2021)	
9			Pengaruh transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat, dan kompetensi aparatus desa terhadap pengelolaan dana desa. Putri, A. R. L. (2022).	Partisipasi masyarakat berpengaruh positif signifikan terhadap pengelolaan dana desa.
10			Dampak kompetensi dan partisipasi masyarakat terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa kecamatan rambutan banyuasin.	Partisipasi Masyarakat Desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan keuangan dana desa di Kecamatan Rambutan Kabupaten Banyuasin.

			Periansya, P., & AR, S. A. S. (2020)	
11			<p>Pengaruh kompetensi aparat desa dan partisipasi masyarakat terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di kecamatan namorambe kabupaten deli serdang.</p> <p>Pratiwi, P. I., & Dewi, R. S. (2021)</p>	Partisipasi masyarakat berpengaruh signifikan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Namorambe Kabupaten Deli Serdang.
12	Sistem Pengendalian internal	Akuntabilitas pengelolaan dana desa	Pengaruh sistem pengendalian intern pemerintah dan aksesibilitas laporan keuangan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan dana desa (Studi	Sistem pengendalian internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

			<p>Kasus Kelurahan Margokaton Kabupaten Sleman Yogyakarta)</p> <p>Handayani & Ambarwati (2021)</p>	
13			<p>Pengaruh kompetensi pemerintah desa, sistem pengendalian internal, dan aksesibilitas laporan keuangan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa</p> <p>Puspa, D. F., & Prasetyo, R. A (2020)</p>	<p>Sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.</p>

14			<p>Pengaruh kompetensi aparatur desa, sistem pengendalian internal, pemanfaatan teknologi informasi dan partisipasi masyarakat terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa</p> <p>Pahlawan, E. W., Wijayanti, A., & Suhendro, S. (2020)</p>	<p>Sistem pengendalian internal tidak berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.</p>
15			<p>Pengaruh kompetensi aparatur desa, sistem pengendalian internal dan komitmen organisasi terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di kecamatan muara enim</p>	<p>Sistem Pengendalian Intern Pemerintah berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas dalam Pengelolaan Dana Desa di desa-desa yang terdapat di Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim.</p>

			<p>kabupaten muara enin</p> <p>Zulkifl, Z., Sandrayanti, S., & Ariani, N. (2021)</p>	
16			<p>Pengaruh sistem pengendalian internal, kompetensi aparatur pengelola dana desa, dan sistem keuangan desa terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa se-kecamatan petang.</p> <p>Sumadi, N. K., & Muliati, N. K. (2022)</p>	<p>Sistem Pengendalian Internal tidak mempunyai pengaruh pada akuntabilitas pengelolaan dana desa.</p>
17			<p>Pengaruh kompetensi aparatur pengelola dana desa, partisipasi</p>	<p>Sistem pengendalian internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.</p>

			<p>masyarakat, dan sistem pengendalian internal terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa (studi pada aparatur pemerintah desa se-kecamatan banyudono kabupaten boyolali)</p> <p>Atiningsih, S. (2019)</p>	
18			<p>Pengaruh sistem pengendalian intern, sistem informasi akuntansi, dan kompetensi aparat terhadap akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa (Studi Empiris Desa-Desa Di Kabupaten Rokan Hulu)</p>	<p>Sistem pengendalian intern berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa.</p>

			<p>Wahyuni, S., Indrawati, N., & Al Azhar, A. (2018)</p>	
19			<p>Pengaruh kompetensi dan sistem pengendalian internal terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa (Studi Empiris di Kecamatan Beuki Kabupaten Situbondo).</p> <p>Wahyuni, N., & Afroh, I. K. F. (2021)</p>	<p>Sistem Pengendalian Internal berpengaruh terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa</p>

20			<p>Pengaruh sistem keuangan desa, sistem pengendalian intern pemerintah, dan transparansi terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa (studi pada desa di kabupaten aceh tengah)</p> <p>Sari, N., & Asmara, J. A. (2021).</p>	<p>Sistem pengendalian intern pemerintah berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kabupaten Aceh Tengah.</p>
21			<p>Pengaruh komitmen organisasi, sistem pengendalian internal, kompetensi pemerintah desa, transparansi, dan aksesibilitas laporan keuangan terhadap</p>	<p>Sistem pengendalian intern berpengaruh terhadap akuntabilitas dana desa. Pengelolaan Kabupaten Petarukan.</p>

			<p>akuntabilitas pengelolaan dana desa</p> <p>Indriasih, D., Fajri, A., & Febriana, D. (2022).</p>	
22	Aksesibilitas laporan keuangan	Akuntabilitas pengelolaan dana desa	<p>Pengaruh kompetensi pemerintah desa, sistem pengendalian internal, dan aksesibilitas laporan keuangan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa</p> <p>Puspa, D. F., & Prasetyo, R. A (2020)</p>	Aksesibiliras tidak berpengaruh positif atau tidak signifikan terhadap akuntabilitas dana desa
23			<p>Pengaruh penyajian dan aksesibilitas laporan keuangan desa terhadap</p>	<p>Aksesibilitas laporan keuangan desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas Dana Desa di Desa Cijaku dan</p>

			akuntabilitas dana desa Meilani, N., & Sukarmanto, E. (2022)	Malingping, Kabupaten Lebak.
24			Pengaruh komitmen organisasi, sistem pengendalian internal, kompetensi pemerintah desa, transparansi, dan aksesibilitas laporan keuangan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa Indriasih, D., Fajri, A., & Febriana, D. (2022).	Aksesibilitas laporan keuangan berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa Kecamatan Petarukan
25	Komitmen Organisasi	Akuntabilitas pengelolaan dana desa.	Pengaruh kompetensi aparatur, komitmen	Komitmen organisasi berpengaruh secara signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan

			<p>organisasi, pemanfaatan teknologi informasi, partisipasi masyarakat dan spi terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di kabupaten indragiri hulu</p> <p>Sarah, S., Taufik, T., & Safitri, D. (2020)</p>	<p>dana desa di Kabupaten Indragiri Hulu.</p>
26			<p>Pengaruh kompetensi aparat pengelolaan dana desa, komitmen organisasi pemerintah desa, dan partisipasi masyarakat terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di gorontalo</p>	<p>Komitmen organisasi pemerintah desa berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.</p>

			Mada, S., Kalangi, L., & Gamaliel, H. (2017)	
27			Pengaruh kompetensi aparatur desa, sistem pengendalian internal dan komitmen organisasi terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di kecamatan muara enim kabupaten muara enim Zulkifl, Z., Sandrayanti, S., & Ariani, N. (2021)	Komitmen Organisasi berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas dalam Pengelolaan Dana Desa di desa-desa yang terdapat di Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim.
28			Pengaruh kompetensi aparat desa dan komitmen organisasi terhadap akuntabilitas dana desa Tarjo, T. (2019)	Komitmen organisasi berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas dana desa.

29			<p>Pengaruh kompetensi aparat pengelola dana desa, komitmen organisasi pemerintah Desa, dan partisipasi masyarakat terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa</p> <p>(Studi Empiris Pada Kantor Desa Se-Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan)</p> <p>Sari, N. M. R., & Padnyawati, K. D. (2021)</p>	<p>Komitmen organisasi pemerintah desa berpengaruh positif tidak signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa</p>
30			<p>Pengaruh kompetensi aparatur, komitmen organisasi, dan partisipasi masyarakat terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di</p>	<p>Komitmen organisasi tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa</p>

			kecamatan batujajar Giriani, M., Dahtiah, N., & Burhany, D. I (2021)	
31			Pengaruh komitmen organisasi, sistem pengendalian internal, kompetensi pemerintah desa, transparansi, dan aksesibilitas laporan keuangan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa Indriasih, D., Fajri, A., & Febriana, D. (2022).	Komitmen organisasi signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Berdasarkan tabel 1.1 gap penelitian yang telah di teliti pada penelitian terdahulu mengatakan bahwa kebanyakan penelitian berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Tetapi ada beberapa penelitian yang menjelaskan bahwa variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen yaitu pada yang dilakukan Giriani, M., dkk (2021) pada variabel X1 Partisipasi masyarakat tidak mempengaruhi secara signifikan akuntabilitas pengelolaan dana desa, penelitian yang diteliti Pahlawan, E. W., dkk (2020) terjadi di variabel X2 yang mengatakan bahwa sistem pengendalian internal tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Sumadi N. K., & Muliati, N. K. (2022) pada variabel X2 mengatakan bahwa sistem pengendalian internal tidak berpengaruh terhadap pengelolaan dana desa, penelitian yang dilakukan oleh Puspa, D. F., & Prasetyo, R. A (2020) pada X3 mengatakan bahwa aksesibilitas laporan keuangan tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa, pada variabel X4 penelitian yang dilakukan oleh Sari, N. M. R., & Padnyawati, K. D. (2021) mengatakan bahwa komitmen organisasi berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa, dan penelitian yang dilakukan oleh iriani, M., dkk (2021) menjelaskan tidak berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Akuntabilitas pengelolaan dana desa dapat berjalan lancar dan terciptanya keberhasilan dengan adanya beberapa faktor. Faktor partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan kebijakan publik merupakan motor penggerak yang bisa mempercepat pelaksanaan akuntabilitas pemerintah desa. Partisipasi masyarakat sangat penting dalam penganggaran untuk mencegah terjadinya penyimpangan kebijakan (Taufik, Taufeni, 2009). Ditemukan juga oleh Aulia, Putri (2018), Medianti, Larastika(2018), dan perdana , Khaeri wahyu (2018) yang berpendapat bahwa partisipasi masyarakat menjadia salah satu faktor yang mempengaruhi akuntabilitas dana desa.

Faktor yang kedua yang berhubungan dengan akuntabilitas dana desa adalah sistem pengendalian internal (SPI). Dfinisi sistem pengendalian internal pada peraturan perundang-undangan No.60 tahun 2008 untuk SPIP adalah suatu Tindakan dan kegiatan yang terus menerus dari manajemen dan seluruh pegawai atau karyawan untuk memberikan keyakinan yang wajar dalam mencapai tujuan organisasi. Sama dengan pendapat dari Widyatama, Arif (2017) dan Rosyidi, Muhammad (2018) berpendapat yaitu sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap akuntabilitas dana desa. Didalam penelitian tersebut menjelaskan bahwa sistem pengendalian internal bisa melakukan pencegahan kecurangan yang dapat terjadi didalam lingkungan pemerintahan dan berkontribusi pada tata Kelola yang lebih baik, Taufik, Taufeni (2017) dan Taufik, Taufeni (2019)

Aksesibilitas laporan keuangan adalah faktor yang begitu sangat penting dalam menjalankan akuntabilitas pengelolaan dana desa. Aksesibilitas yaitu suatu bagian dari prinsip *good governance*, karena aksesibilitas merupakan satu upaya agar terwujudnya *good governance*. Pemerintah desa harus melakukan transparansi dalam melakukan suatu kegiatan apapun yang menggunakan dana desa. Dalam pelaksanaan tujuan yang mudah dicapai, kemungkinan besar akan tercapainya tujuan yang langsung, berkesinambungan dan bermakna (Kanisius, 2003). Masyarakat memiliki hak dasar terhadap pemerintah, termasuk hak untuk menerima dan memberikan informasi yang relevan dengan kesejahteraan mereka yang berkelanjutan. Laporan keuangan pemerintah adalah suatu bentuk hak publik yang harus diberikan oleh pemerintah. Aksesibilitas laporan keuangan bisa diartikan sebagai membuat laporan keuangan dapat diakses dengan mudah dan murah kepada pihak yang berkepentingan (Santi et al., 2018).

Selain adanya faktor partisipasi masyarakat, sistem pengendalian internal (SPI), dan aksesibilitas laporan keuangan juga terdapat faktor komitmen organisasi dalam melakukan keberhasilan pengelolaan dana desa. Komitmen organisasi sendiri merupakan bentuk suatu intensi dari objek yang diyakini dalam gagasan yang menyatakan tentang tatanan yang baik terbentuk dari sebuah komitmen (Edison et al., 2016). Sedangkan alat psikologis dalam menjalankan kegiatan organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dimana komitmen organisasi yang baik akan

mendorong peningkatan akuntabilitas publik khususnya akuntabilitas keuangan (Mada et.al., 2007). Dalam komitmen pegawai tidak hanya dapat dilihat dari loyalitas terhadap organisasi, tetapi adanya peran yang begitu aktif dari pegawai untuk memajukan organisasi. Adapun komponen utama komitmen organisasi menurut Yuesti dan Merawati (2019) meliputi “komitmen afektif, komitmen keberlanjutan, dan komitmen normatif”. Seseorang yang berkomitmen pada organisasi diakui dengan adanya prinsip dan pengakuan yang kuat terhadap tujuan organisasi, bertekad untuk bertahan dalam organisasi, dan bersedia mengoptimalkan kinerja untuk mencapai tujuan organisasi (Medianti, 2018)

Dibuktikan dengan hasil penelitian sebelumnya, maka penelitian melakukan replikasi dari penelitian Puspa, D. F., & Prasetyo, R. A (2020) yang berjudul Pengaruh kompetensi pemerintah desa, sistem pengendalian internal, dan aksesibilitas laporan keuangan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu pada bagian sampel penelitian diambil di kecamatan Pucakwangi, dan di kecamatan Winong pemilihan sampel didasarkan adanya keterlambatan mengenai penyaluran dana desa yang menyebabkan tertundanya pencairan dana di Kabupaten Pati sehingga belum sepenuhnya terealisasi. Dengan demikian dijelaskan dengan latar belakang, penelitian ini berjudul “Pengaruh partisipasi masyarakat, sistem pengendalian internal, aksesibilitas laporan keuangan dan komitmen organisasi terhadap akuntabilitas dana desa di kecamatan Pucakwangi dan di kecamatan

Winong Kabupaten Pati” dalam hal ini ada penambahan variabel baru dalam judul penelitian saya yaitu komitmen organisasi dikarenakan komitmen sangat penting yang dimiliki oleh seseorang. Didalam komitmen seseorang bisa mengukur seberapa besarnya seseorang itu konsisten dan bertanggungjawab, boleh dalam kondisi yang mudah maupun sulit, senang atau susah, dan ringan ataupun berat. Tanpa komitmen, tidak akan konsisten. Organisasi yang sangat baik akan terdiri dari orang-orang yang memiliki komitmen yang tinggi. Semakin orang memiliki keinginan yang tinggi dalam melakukan komitmen maka akan semakin baik pencapaian disuatu organisasi tersebut. Orang yang berkomitmen akan selalu memberikan yang terbaik untuk apa yang mereka lakukan. Dari penelitian sebelumnya yang terdapat variabel kompetensi pemerintah desa yang saya ganti dengan variabel partisipasi masyarakat dikarenakan disini saya mau membahas bagaimana masyarakat dalam keikutsertaan dalam membangun, keterlibatan diproses arah dari strategi kebijaksanaan pembangunan yang dilaksanakan pemerintah.

C. Rumusan Masalah Penelitian

Dalam pemaparan latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah :

- 1) Apakah partisipasi masyarakat berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa?

- 2) Apakah sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa?
- 3) Apakah aksesibilitas laporan keuangan berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa?
- 4) Apakah komitmen organisasi berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa?

D. Tujuan penelitian

Dalam rumusan masalah tersebut yang menjadi tujuan penelitian ini adalah:

- 1) Untuk menguji dan menemukan bukti empiris bahwa partisipasi masyarakat berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.
- 2) Untuk menguji dan menemukan bukti empiris bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.
- 3) Untuk menguji dan menemukan bukti empiris bahwa aksesibilitas laporan keuangan berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.
- 4) Untuk menguji dan menemukan bukti empiris bahwa komitmen organisasi berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

E. Manfaat Penelitian

Dalam hasil penelitian ini di harapkan dapat memberikan manfaat antara lain :

- Manfaat secara praktis
 - a. Bagi akademis

Akan memberikan wawasan dan pemahaman untuk menambah ilmu dalam bidang akuntansi terhadap akuntabilitas dana desa di Kabupaten Pati.
 - b. Bagi Pemerintah Desa

Akan dapat memberi manfaat bagi pemerintah desa.
 - c. Bagi Masyarakat

Akan memberikan informasi yang akurat kepada masyarakat tentang akuntabilitas dana desa. Sehingga masyarakat akan tau bahwa apa kelebihan dari desa tersebut.
- Manfaat Teoritis

Di dalam penelitian ini maanfaat teoritis sebagai media untuk memberikan informasi tentang partisipasi masyarakat, SPI, aksesibilitas laporan keuangan dan komitmen organisasi. Untuk pengetahuan di sektor publik sendiri akan menjadi meningkat dengan adanya penelitian ini.